Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Menurut UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

Moch. Fikri Azzam N. S.^{*}, M. Husni Syam

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fikriazzam7@gmail.com, mhস্যam@gmail.com

Abstract. This study discusses "Protection of Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia according to Law no. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers" stated in Law no. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. The purpose of this study is to find out how the form of regulation and implementation of the protection of Indonesian migrant workers in Law no. 18 of 2017. This type of research is normative legal research, by reviewing the laws and regulations regarding the protection of migrant workers. Sources of data used in this study are secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Various problems that often occur in Indonesian migrant workers, especially those working in the informal sector, such as; violence/torture, harassment, human trafficking, unpaid wages, etc. These cases often occur in legal and illegal Indonesian migrant workers before work, during work and after work.

Keywords: *Legal Protection, Indonesian Migrant Workers, Migrant Workers.*

Abstrak. Penelitian Ini membahas tentang "Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Menurut UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan maupun implementasi perlindungan pekerja migran Indonesia dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan tentang perlindungan pekerja migran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berbagai masalah yang sering terjadi pada pekerja migran Indonesia khususnya yang bekerja di sektor informal, seperti; kekerasan/penyiksaan, pelecehan, perdagangan manusia, gaji tidak dibayar, dsb. Kasus tersebut sering terjadi pada pekerja migran Indonesia legal maupun ilegal pada masa sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Pekerja Migran, PMI.*

A. Pendahuluan

Bekerja adalah hak dasar dari manusia. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri sendiri dan keluarganya, dapat juga digambarkan sebagai pengembangan diri, sehingga seseorang merasa hidupnya lebih berharga. Indonesia sebagai negara hukum memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak asasi manusia (HAM) tersebut. Seperti tertulis dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 45 yaitu, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Secara ekonomi, mereka yang bekerja ini masuk dalam kelompok tenaga kerja. Menurut KBBI tenaga kerja didefinisikan sebagai, “orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu; pekerja, pegawai dan sebagainya.” Sedangkan untuk melindungi tenaga kerja dan pihak-pihak terkait, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Masalah tenaga kerja dari tahun ke tahun adalah sama yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Karena jumlah tenaga kerja yang ada tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan. Persaingan tenaga kerja di Indonesia sendiri semakin sulit dilihat dari tingkat pendidikan dan tingkat keahlian yang tidak memadai. Hal ini juga dipengaruhi oleh masuknya tenaga kerja asing (TKA), ditambah lagi dengan masuknya teknologi ke dalam kehidupan industri. Sehingga sumber daya manusia (SDM) Indonesia dianggap tidak memadai untuk industri.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada Februari tahun 2022, jumlah angkatan kerja yang bekerja mencapai 144,01 juta jiwa dan terdapat 8,40 juta jiwa jumlah orang yang tidak bekerja, apalagi jika dihitung sejak awal pandemi Covid-19 sampai sekarang, tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi, ditambah banyaknya perusahaan gulung tikar dan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Artinya banyak penduduk Indonesia yang sangat produktif untuk bekerja namun tidak memiliki pekerjaan, baik karena tidak bekerja maupun sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada. Setiap orang berhak untuk memilih di mana mereka akan bekerja, termasuk untuk bekerja di luar negeri. Dilihat dari jumlah pengangguran yang ada, masyarakat tidak mampu untuk membuat usaha karena terkendala oleh modal, keterampilan, serta jarak dan akses pasar yang jauh dari pemukiman sebagian masyarakat. Kecilnya peluang untuk mendapat pekerjaan membuat masyarakat semakin bermasalah, salah satunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa masyarakat berusaha untuk keluar dari masalah mereka yaitu dengan memilih menjadi pekerja migran Indonesia (PMI).

Meskipun telah terdapat Undang-Undang dan lembaga-lembaga yang ditunjuk dan ditugaskan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran, namun pada kenyataannya kasus kekerasan, penganiayaan dan kasus pelanggaran HAM lainnya yang menimpa para pekerja migran Indonesia khususnya yang bekerja di sektor informal. Hal ini merupakan permasalahan yang serius dan menandakan bahwa pemerintah hingga saat ini belum memberikan jaminan perlindungan bagi warga negaranya yang bekerja di luar negeri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pengaturan perlindungan pekerja migran Indonesia dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?” dan “Bagaimana implementasi perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan pekerja migran Indonesia dalam UU No. 18 tahun 2017.
2. Mengetahui bagaimana implementasi perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia seperti Undang-Undang. Sedangkan pendekatan konsep (conceptual approach) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia

baik diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana Pengaturan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?

Perlindungan pekerja migran Indonesia oleh Perwakilan Negara Indonesia di luar negeri tidak terlepas dari tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan...”.

Amanat tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang memberikan mandat kepada Perwakilan RI untuk melakukan perlindungan dan pengayoman kepada warga negaranya di luar negeri melalui bantuan hukum dan cara-cara lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang kemudian telah diperbaharui dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Permenlu No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

Pembahasan mengenai perlindungan kekonsuleran terhadap pekerja migran Indonesia yang terlibat masalah hukum berhubungan dengan upaya perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap pekerja migran Indonesia selama bekerja. Dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa pelaksanaan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia selama bekerja meliputi:

1. Pendataan atau pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.
2. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja.
3. Fasilitas pemenuhan hak pekerja migran Indonesia.
4. Pemberian layanan jasa kekonsuleran.
5. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan RI serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat.
6. Pembinaan terhadap pekerja migran Indonesia.
7. Pemberian fasilitas repatriasi.

Disebutkan pada ayat selanjutnya bahwa dalam melakukan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia selama bekerja dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana/perdata para pekerja migran Indonesia serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Selain UU No. 18 Tahun 2017 yang mengatur secara umum mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja di luar negeri, terdapat juga Permenlu No. 5 Tahun 2018 yang di dalamnya diatur secara khusus langkah-langkah pelayanan dan perlindungan kekonsuleran oleh Perwakilan RI/Direktorat PwNI-BHI kepada warga negara Indonesia/pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dalam ketentuan umum dari Permenlu No. 5 Tahun 2018 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri.

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Permenlu No. 5 Tahun 2018 dilakukan dengan prinsip:

1. Mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab atau berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak mengambil alih tanggung jawab pidana/perdata warga negara Indonesia.
3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Untuk mewujudkan prinsip perlindungan seperti yang disebutkan, maka secara umum terdapat tiga langkah strategis atau sering disebut dengan tiga lingkup upaya perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri yang meliputi pencegahan (*prevention*), deteksi dini (*early detection*), dan perlindungan secara cepat dan tepat (*immediate response*) yang bertujuan untuk menekan terjadinya peningkatan kasus-kasus yang terjadi di luar negeri.

Disebutkan dalam Pasal 3 Permenlu No. 5 Tahun 2018 bahwa pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri dilakukan oleh negara, yang dilaksanakan oleh presiden sebagai kepala negara, Pemerintah Pusat dalam hal ini melalui Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI yang berada dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dan Lembaga/Badan yang berada dalam koordinasi Kementerian Luar Negeri.

Adapun bentuk perlindungan yang dapat dilakukan oleh keempat unsur sebagaimana yang telah disebutkan di atas terdiri dari perlindungan kekonsuleran dan perlindungan diplomatik. Beberapa upaya perlindungan kekonsuleran terhadap pekerja migran Indonesia yang terlibat kasus hukum di negara setempat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Permenlu No. 5 Tahun 2018 berupa:

1. Melakukan kunjungan ke penjara-penjara di negara setempat.
2. Mewakili pekerja migran Indonesia di depan pengadilan dan instansi lain di negara setempat berdasarkan praktek dan tata cara yang berlaku di negara setempat.
3. Mendapatkan notifikasi kekonsuleran dari negara setempat.
4. Melakukan pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa penyediaan jasa advokat.

Adapun perlindungan diplomatik yang merupakan upaya perlindungan lebih bagi pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh negara terhadap negara setempat dapat dilakukan apabila perlindungan kekonsuleran telah diberikan secara maksimal dan terdapat pertimbangan khusus dari Presiden berdasarkan usulan Menteri Luar Negeri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Permenlu No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan WNI di Luar Negeri.

Upaya perlindungan WNI di luar negeri oleh perwakilan RI dikedepankan dengan menggunakan pendekatan antara lain:

1. Pendekatan hukum berupa mediasi dan konsiliasi, konsultasi hukum, dan pengacara.
2. Pendekatan kemanusiaan berupa kunjungan rutin untuk konsultasi, pemberian bantuan awal, pendampingan rohani, penanganan kesehatan, penampungan, pemulangan warga negara Indonesia ke Indonesia dan bantuan dana pemulangan.
3. Pendekatan diplomasi seperti hubungan diplomasi antar pemerintah, orang dengan orang seperti yang dilakukan antara pelaku dengan keluarga korban, diplomasi antara pemerintah dengan organisasi non-pemerintahan, kerjasama pemerintah dengan organisasi internasional, dan lain sebagainya.

Bagaimana Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi?

Dalam perannya melindungi pekerja migran Indonesia yang terkena kasus di Arab Saudi, Perwakilan RI di Arab Saudi akan melakukan beberapa akses kekonsuleran untuk memastikan bahwa pekerja migran Indonesia diperlakukan secara adil sesuai hukum yang berlaku.

Arab Saudi adalah salah satu negara yang tidak mengenal pemberitahuan terlebih dahulu kepada keluarga/wali dari pelaku yang akan dieksekusi hukuman mati, pemberitahuan hanya akan dilakukan setelah dilaksanakannya eksekusi tersebut. Sehingga perwakilan yang ada di KBRI Riyadh atau KJRI Jeddah harus secara aktif dan rutin melakukan pengecekan di penjara. Kunjungan ke penjara-penjara di Arab Saudi tidak dapat dilakukan secara langsung di instansi-instansi terkait di Arab Saudi seperti kepolisian dan pengadilan, tanpa terlebih dahulu mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Hal tersebut yang menjadi kendala Perwakilan untuk mencari informasi secara cepat mengenai pekerja migran Indonesia yang terancam eksekusi mati. Maka sebagai alternatif perwakilan akan mencari tahu dari media masa atau media sosial mengenai adanya pekerja migran Indonesia yang terancam hukuman mati atau sedang berada di dalam penjara.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, Perwakilan Indonesia di Arab Saudi akan melakukan pendampingan selama proses hukum tersebut berlangsung. Salah satu langkah perwakilan dalam melakukan pendampingan adalah memastikan bahwa tersangka telah mendapatkan bantuan hukum baik pengacara maupun penerjemah berkompeten yang memiliki keberpihakan kepada tersangka.

Permasalahan yang dihadapi Perwakilan RI dalam menyewa jasa pengacara di luar negeri adalah keberpihakan pengacara dan biaya yang sangat mahal, oleh karena itu, adanya kerja sama antara

Perwakilan RI di Arab Saudi dengan kantor pengacara setempat adalah sangat penting dalam perlindungan pekerja migran Indonesia yang terjerat kasus hukuman mati. Pemberian fasilitas bantuan hukum berupa pengacara harus dilakukan dengan segera sebelum perkara pekerja migran Indonesia yang terjerat kasus hukuman mati tersebut dibawa dan diproses di pengadilan. Hal ini dilakukan mengingat akan lebih sulit untuk memberikan bantuan hukum jika perkara tersebut telah diproses di pengadilan.

Selain biaya menyewa jasa pengacara yang mahal, konsep pengacara di Arab Saudi baru muncul pada tahun 2011, sedangkan *Bar Association* (Asosiasi Pengacara) di Arab Saudi muncul pada tahun 2014, hal ini menyebabkan kasus-kasus pekerja migran Indonesia di bawah tahun tersebut sulit untuk ditangani. Meskipun di Arab Saudi terdapat pengacara gratis yang disediakan oleh pemerintah setempat, namun Perwakilan RI dalam hal ini tetap akan melihat keberpihakan dari pengacara yang bersangkutan di samping keahliannya dalam beracara.

Penanganan kasus hukuman mati di Arab Saudi mempunyai tata caranya masing-masing, hal ini disebabkan karena sistem hukuman di Arab Saudi yang terdiri dari tiga kategori yaitu ta'zir, qishas, dan hudud. Dalam kasus Tuti Tursilawati yang dihukum mati pada tahun 2018, hakim menjatuhkan vonis kepada yang bersangkutan dengan hukuman hadd ghillah bukan qishas setelah yang bersangkutan terbukti melakukan pembunuhan terhadap majikannya.

Meskipun Tuti Tursilawati dijatuhi vonis hukuman mati kategori hudud yang dalam hal ini tidak dapat dimaafkan baik oleh raja maupun keluarga korban, namun Pemerintah RI selalu mengupayakan perlindungan kekonsuleran kepada yang bersangkutan baik berupa upaya hukum di pengadilan maupun perlindungan diplomatis berupa permohonan pembebasan terhadap Kerajaan Arab Saudi. Upaya perlindungan hukum pemerintah dalam peringanan hukuman Tuti adalah berupa 3 kali penunjukan pengacara Tuti dalam kurun waktu 2011 sejak ditetapkannya vonis hukuman hadd ghillah oleh pengadilan sampai dengan tahun 2018 yang bersangkutan dieksekusi, 3 kali permohonan banding, dan 2 kali peninjauan kembali (PK), di mana Qadha al-'Ala menggantikan majelis hakim untuk memeriksa kembali kasus tersebut. Selain itu Pemerintah juga memfasilitasi kunjungan keluarga Tuti Tursilawati ke penjaranya pada tahun 2012, 2015, dan 2018, dan kunjungan ke lembaga pemaafan Lajnah 'Afwu dan Kantor Walikota Thaif.

Dalam hal ketika hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati berupa hadd ghillah, maka segala upaya untuk meringankan hukuman tersebut tidak dapat dilakukan baik pemaafan oleh Raja Arab Saudi melalui surat dari Presiden RI, maupun permohonan pemaafan kepada keluarga korban.

Mengenai yang mendapatkan hukuman qishas, maka perwakilan dalam hal ini akan memberikan beberapa upaya agar pekerja migran Indonesia yang bersangkutan mendapatkan pemaafan dari keluarga korban. Pemaafan yang didapatkan dari keluarga korban selanjutnya akan ditebus dengan dibayarkannya uang darah atau diyat.

Diyat syar'i yang ketentuannya adalah seharga 100 ekor unta bagi korban laki-laki dan 50 ekor unta bagi korban perempuan ditentukan harganya dalam bentuk uang saat ini dalam Dekrit Raja. Sedangkan diyat yang berasal dari permintaan keluarga, karena tidak ditentukan secara jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah oleh pengadilan setempat akan diberikan ketentuan harga dari diyat tersebut kepada keluarga korban berdasarkan pada penghasilan korban selama hidupnya.

Untuk dapat menebus diyat yang memiliki harga milyaran, maka Perwakilan RI dapat meminta Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk mencari biaya tebusan, baik dari keluarga pekerja migran Indonesia bersangkutan, maupun dari Pemerintah RI atau dari para donatur yang bersimpati. Selain bantuan dari Indonesia yang diberikan kepada para terdakwa, di Arab Saudi terdapat lembaga yang berperan dalam memberikan bantuan tebusan diyat bagi para terdakwa yaitu Lajnah 'Afwu. Lajnah 'Afwu adalah sebuah lembaga pengampunan di Arab Saudi yang memiliki fungsi sebagai mediator antara terdakwa yang dikenai hukuman qishas dengan korban/keluarga korban. Selain berfungsi sebagai mediator, lembaga ini juga berperan dalam membantu para terdakwa yang dinyatakan tidak mampu membayar diyat oleh pengadilan setempat dengan mencari para dermawan yang secara sukarela menebus diyat tersebut.

Meskipun pemaafan dalam kasus hukuman qishas mengharuskan dibayarkannya diyat, namun ada beberapa upaya pemaafan yang berhasil dilakukan oleh Perwakilan RI tanpa mengeluarkan diyat satu rupiah sama sekali. Tergantung dari kemampuan Perwakilan RI melakukan lobi dan kebaikan dari ahli waris korban.

Kendala yang dihadapi oleh Perwakilan RI dalam penanganan kasus hukuman mati di Arab Saudi adalah proses beracara di Pengadilan Arab Saudi yang memakan waktu bertahun-tahun. Hal ini disebabkan karena sistem hukum Arab Saudi yang berdasarkan pada syariah dan pengadilan di Arab Saudi yang sangat memperhatikan proses beracara dan berhati-hati dalam pemberian keputusan. Dalam kasus pembunuhan misalnya, ketika ingin dilakukan tanazul dan terdapat ahli waris korban yang masih berada di bawah umur, maka proses tanazul tersebut untuk sementara dihentikan sampai yang bersangkutan

dinyatakan memiliki tanggung jawab hukum. Hal tersebut yang menjadi alasan lamanya penanganan kasus pekerja migran Indonesia terancam hukuman mati, bahkan kasus-kasus yang telah ada sejak awal 2000-an sampai saat ini masih belum selesai penanganannya.

Apabila dilihat dari kasus di atas, secara umum peran Pemerintah Indonesia dalam perlindungan pekerja migran Indonesia terpidana mati di luar negeri sudah sangat besar. Bahkan dalam kasus Tuti Tursilawati yang secara hukum di Arab Saudi sudah inkrah keputusannya dan tidak bisa lagi dilakukan pemaafan oleh ahli waris maupun Raja Arab Saudi, Pemerintah Indonesia masih dilakukan pendampingan dan perlindungan hingga Tuti Tursilawati dieksekusi. Yang terpenting dalam melakukan perlindungan adalah Pemerintah Indonesia tidak hanya terfokus pada upaya perlindungan hukum di depan pengadilan atau litigasi, tetapi pendekatan ke keluarga korban, pemerintah daerah setempat, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat merupakan hal terpenting dari perlindungan tersebut mengingat vonis hukuman mati terhadap pekerja migran Indonesia di Arab Saudi sebagian besar berasal dari kasus pembunuhan yang kemudian dikenai vonis hukuman mati kategori qisas.

Akibat banyaknya eksekusi mati yang menimpa para pekerja migran Indonesia, Presiden dapat membentuk Satgas untuk menangani kasus warga negaranya yang terancam hukuman mati. Hal ini pernah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui KEPPRES RI No. 17 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati,

Satgas yang bekerja selama enam bulan sejak ditetapkannya melalui Keppres pada tanggal 7 Juli 2011 tersebut memiliki tugas yaitu:

1. Mencari informasi terkait permasalahan dan kasus-kasus warga negaranya yang terancam hukuman mati.
2. Melakukan advokasi dan memberikan bantuan hukum bagi warga negaranya di luar negeri yang sedang menjalani proses hukum, khususnya yang terancam hukuman mati.
3. Melakukan evaluasi terhadap penanganan kasus hukum warga negaranya di luar negeri, termasuk kasus-kasus yang merugikan pekerja migran Indonesia di negara-negara penempatan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai langkah-langkah penyelesaian dan penanganan kasus-kasus hukum pekerja migran Indonesia di negara penempatan.

Di samping mengupayakan perlindungan kekonsuleran, Pemerintah Indonesia juga aktif melakukan pendekatan diplomatik dalam melakukan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang terancam eksekusi mati. Perlindungan diplomatik adalah upaya perlindungan lebih bagi pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh Indonesia terhadap negara setempat, perlindungan ini hanya dapat dilakukan apabila mekanisme hukum di negara penerima dan segala upaya perlindungan kekonsuleran telah ditempuh oleh Perwakilan RI.

Hal yang mendasari dilaksanakannya perlindungan diplomatik setelah segala upaya kekonsuleran dilakukan adalah karena masalah hukum yang terjadi di Arab Saudi adalah masalah antara warga negara dengan warga negara, bukan antara negara dengan negara, atau negara dengan warga negara. Sehingga ketika terdapat pekerja migran Indonesia yang terlibat masalah hukuman mati, maka negara tidak bisa secara spontan melakukan pengiriman surat atau *lobbying* kepada Pemerintahan Arab Saudi mengenai pembebasan atau peringanan hukuman pekerja migran Indonesia yang bersangkutan.

Selain itu perlindungan diplomatik yang dilakukan tanpa didahului upaya perlindungan kekonsuleran terlebih dahulu secara terus menerus dapat berdampak buruk baik kepada negara maupun warga negara.

Ketika segala upaya perlindungan kekonsuleran tidak membuahkan hasil, maka selanjutnya akan dilakukan perlindungan yang bersifat diplomasi. Beberapa langkah diplomatik yang sering dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk membebaskan pekerja migran Indonesia yang terjerat kasus hukuman mati, salah satunya yang sering dilakukan adalah permohonan pembebasan melalui surat atau permohonan langsung oleh pemerintah ke pemerintah negara yang bersangkutan dan keluarga korban.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam kerjasama bilateral Indonesia – Arab Saudi tentang penempatan dan perlindungan PMI, penulis tidak dapat menilai bahwa Pemerintah Indonesia benar atau Pemerintah

Arab Saudi yang salah, karena kedua negara memiliki sistem hukum yang berbeda terutama pada negara-negara penempatan di Timur Tengah yang masih menganut sistem kafalah sehingga apapun perjanjian kerjasama yang berhasil disepakati kedua negara akan tidak dapat berlaku apabila para pekerja migran Indonesia sudah berada di tangan majikannya. Sehingga segala masalah yang terjadi di sana adalah *miss communication* yang bisa dibalang tidak akan bisa diluruskan karena pada kenyataannya Indonesia tidak akan pernah bisa merubah apapun dari suatu sistem di negara asing.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap pekerja migran yang bekerja di luar negeri khususnya di Arab Saudi menjamin hak-hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan berupa bantuan hukum kepada pekerja migran Indonesia yang mengalami permasalahan. Bentuk perlindungan ini adalah sebuah kewajiban dari pemerintah Indonesia sebagai jaminan kepada warga negaranya yang bekerja sebagai pekerja migran di Arab Saudi.
3. Demi menjamin dan melindungi pekerja migran Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Beberapa pekerja migran Indonesia ini tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan, kultur dan budaya, serta dari pekerja migran Indonesia sendiri yang lemah dalam berkomunikasi kepada majikan/perusahaan. Pelanggaran-pelanggaran HAM yang diterima para pekerja migran Indonesia ini menjadi dasar untuk memperkuat pelaksanaan konsep perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri dari pemerintah Indonesia untuk jaminan perlindungan upah, kesehatan dan keselamatan dalam bekerja.
4. Sedangkan Pemerintah Arab Saudi dalam perjanjian bilateral Indonesia-Arab Saudi yakni Memorandum of Understanding (MoU) telah menyebutkan bahwa di dalamnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia khususnya yang bekerja di sektor informal. Dalam MoU tersebut secara jelas sudah menjadi dasar jaminan terhadap pekerja migran Indonesia, baik dalam hal perlindungan secara fisik, upah, kesehatan, dll.
5. Konsep perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dalam MoU sudah jelas tertera di dalamnya. Konsep perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia terletak dalam proses penanganan/lapangan. Proses yang dialami pekerja migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi masih jauh dari kata tepat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum yang berlaku. Karena di Arab Saudi sendiri masih banyak TKI yang mengalami permasalahan yang disebabkan dari kesewenang-wenangan majikan. Sistem kafala ini yang membolehkan majikan menahan paspor dan visa milik pekerja migran Indonesia yang secara tidak langsung menyebabkan majikan memiliki kekuasaan penuh terhadap para pekerja migran Indonesia, dan wajib mendapatkan izin dari majikan apabila pekerja migran Indonesia ingin berhenti atau pindah pekerjaan.
6. Selain dasar hukum yang berbeda juga menyebabkan sulitnya pekerja migran Indonesia mendapatkan perlindungan hukum secara pasti untuk setiap kasus yang dialami. Arab Saudi menggunakan Hukum Islam atau Hukum Syariah sebagai dasar hukum sehingga aturan-aturan yang ditetapkan berbeda.

Daftar Pustaka

- [1] CNN Indonesia, Kronologi Kasus Tuti Hingga Dieksekusi Mati di Arab Saudi, 2018, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181030200206-106-342747/kronologi-kasus-tuti-hingga-dieksekusi-mati-di-saudi>.
- [2] Suci Sekarwati, Jalan Panjang Kemenlu Selamatkan TKI Tuti Tursilawati, Tempo, <https://dunia.tempo.co/read/1142067/jalan-panjang-kemenlu-selamatkan-tki-tuti-tursilawati>
- [3] Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri dan Unit Kajian Hukum Perlindungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Kajian Upaya Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan TKI di Luar Negeri, Jakarta: Kemlu,

2011.

- [4] Maulidna, R. Nayra Nada, Sundary, Rini Irianti. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 62-66.
- [5] Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, *Diplomasi Indonesia 2014*, hlm. 210.
- [6] Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri*, hlm. 52.